



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 Telp. (0293) 363650 - Fax (0293) 313126 Magelang 56101  
Email : [bappeda@magelangkota.go.id](mailto:bappeda@magelangkota.go.id) – twitter : @bappedakotamgl  
Website : [bappeda.magelangkota.go.id](http://bappeda.magelangkota.go.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KOTA MAGELANG**

Nomor : 050.25 / 101.6 / 410 TAHUN 2019

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENJABARAN KINERJA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**TAHUN 2019-2021**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama dan penjabaran kinerja pada setiap level manajerial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2019-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2016-2021 Kota Magelang;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENJABARAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019-2021.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Penjabaran Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama dan Penjabaran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama dan Penjabaran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 12 Desember 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA MAGELANG,



**JOKO SOEPARNO**

**LAMPIRAN :**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 050.25/101.6/410 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENJABARAN KINERJA

DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2016-2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENJABARAN KINERJA ESELON III DAN IV  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG****TAHUN 2019 – 2021****I. INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1. Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	1. Presentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Renja	%	Total target sasaran terlaksana/jumlah target sasaran perencanaan pembangunan di kalikan 100%	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	RPJMD, RKPD, Renstra, Renja OPD
2. Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	1. Presentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	%	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir APBD/Jumlah usulan masyarakat di kalikan 100%	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	1. Usulan masyarakat yang dalam hasil Musrenbang 2. APBD Pemerintah Kota Magelang
3. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	%	% usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD ditambah % pokok pokok pikiran DPRD yang diakomodir dalam RKPD ditambah % Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD ditambah % usulan masyarakat di <i>E- Aspirasi</i> yang terakomodir dalam Renja PD dibagi 4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	1. Data hasil musrenbang 2. Renja OPD 3. Data Pokok Pikiran Dewan 4. Data usulan hasil Konsultasi Publik dan FGD 5. Data usulan masyarakat dalam <i>E- Aspirasi</i>

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
4. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	%	% Tingkat keselarasan Renstra PD dengan Renja PD ditambah % Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD ditambah % Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD dibagi 3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	RPJMD, RKPD, Renstra, Renja OPD

**II. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG DAN SUBBAGIAN DIBAWAHNYA.**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b><u>SEKRETARIS : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG</u></b>					
1. Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan	1. Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran	%	Jumlah aparatur perencana Bappeda yang mengikuti diklat perencanaan dan penganggaran di bagi total personil Bappeda	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	Data karyawan yang mengikuti diklat perencanaan dan penganggaran
	2. Cakupan seminar/ Workshop/ pelatihan yang diselenggarakan Bappeda	%	Jumlah personil yang seharusnya mengikuti workshop/ pelatihan yang diselenggarakan Bappeda dibagi total personil Bappeda yg harus mengikuti	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	Data peserta workshop
2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perkantoran, kepegawaian, pemeliharaan barang / asset daerah dan administrasi keuangan	Cakupan terpenuhinya layanan kesekretariatan yang meliputi pelayanan perkantoran, kepegawaian, pemeliharaan barang/ asset daerah dan administrasi keuangan	%	Prosentase terpenuhinya layanan kesekretariatan OPD (jumlah layanan kesekretariatan yang sudah dilaksanakan di bagi dengan layanan kesekretariatan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku)	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	1.Data layanan kesekretariatan sesuai dengan tupoksi 2.Data layanan kesekretariatan yang di laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
3. Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku	1. Prosentase Administrasi pelaporan kegiatan - kegiatan di OPD yang tepat waktu dan sesuai schedull kegiatan.	%	Jumlah pelaporan dan penyelesaian pekerjaan kegiatan tepat waktu / Total jumlah program kegiatan tahun berjalan	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	1. DPPA dan DPPA 2. Data serapan/ progress serapan fisik keuangan
	2. Prosentase terpenuhinya administrasi pelaporan kepegawaian, barang daerah dan keuangan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.	%	Prosentase pelaporan kepegawaian, barang daerah dan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tepat waktu	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	Laporan kepegawaian, barang daerah dan keuangan sesuai ketentuan berlaku

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	3. Capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	%	Nilai LKjIP Bappeda	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	
	4. Capaian kinerja pengelolaan keuangan	%	Persentase serapan keuangan dibagi total anggaran tahun berjalan	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	1. DPPA dan DPPA 2. Data serapan anggaran kegiatan
	5. % ketersediaan Standar Operasional Prosedur	%	Jumlah SOP dibagi jumlah SOP seharusnya	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	Data SOP yang sudah disusun Bappeda
<b>SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>					
1. Tersedianya sarpras yang berkualitas	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas	%	Sarana prasarana yang ada dibagi sarana prasarana yang seharusnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Magelang	1.Data kebutuhan Asset yang di targetkan pada RPJMD 2.Data Aseet dan inventaris BMD Bappeda
2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perkantoran, kepegawaian, pemeliharaan barang / asset daerah	Cakupan terpenuhinya layanan perkantoran, kepegawaian, pemeliharaan barang/ asset daerah	%	Prosentase terpenuhinya layanan perkantoran, kepegawaian, pemeliharaan barang / asset daerah (jumlah layanan yang sudah dilaksanakan di bagi dengan layanan kesekretariatan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku)	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Magelang	1.Data layanan subag umum kepegawaian sesuai dengan tupoksi 2.Data layanan subag umum kepegawaian yang di laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
3. Terwujudnya administrasi kepegawaian, Administrasi perkantoran dan adminitrasi barang/asset daerah yang akurat beserta pelaporan yang tertib dan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku	Prosentase terlaksana dan terpenuhinya administrasi kepegawaian, administrasi perkantoran, administrasi barang daerah beserta pelaporannya yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.	%	Prosentase pelaksanaan administrasi kepegawaian, barang daerah dan perkantoran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pelaporan tepat waktu	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Magelang	Laporan kepegawaian, barang daerah, administrasi perkantoran dan keuangan sesuai ketentuan berlaku

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	5
<b>SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN</b>					
1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan pelaporan yang sesuai peraturan yang berlaku	Prosentase terpenuhinya administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.	%	Prosentase pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tepat waktu	KaSubag Program dan Keuangan Bappeda Kota Magelang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Perencanaan Anggaran</li> <li>2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan beserta data dukungannya</li> <li>3. Dokumen administrasi pengelolaan keuangan</li> <li>4. Dokumen Laporan progress realiasi keuangan dan fisik keuangan</li> </ol>
2. Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan OPD	Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan dokumen pelaporan OPD yang di susun secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Bandel, orang	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan dokumen pelaporan OPD yang di susun secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku di bandingkan dengan dokumen perencanaan, penanggaran dan pelaporan OPD yang seharusnya di penuhi	KaSubag Program dan Keuangan Bappeda Kota Magelang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Perencanaan Anggaran</li> <li>2. Dok. Perencanaan Anggaran Perubahan</li> <li>3. Dokumen Perencanaan OPD</li> <li>4. Dokumen SAKIP OPD beserta dengan Monevnya</li> </ol>



### III. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG PERENCANAAN BAPPEDA KOTA MAGELANG DAN SEKSI/SUBBID DIBAWAHNYA.

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
<b>BIDANG : PERENCANAAN</b>					
1. Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	1. Prosentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	%	Jumlah publikasi data /Jumlah publikasi data yang dibutuhkan (penyebutnya ada 5 : Data Strategis Daerah, Analisis Indikator ekonomi, Analisis indikator Sosial Kota Magelang, Tabel IO Kota Magelang serta Analisis ketimpangan Wilayah) di kalikan 100%	Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Magelang	Dokumen Data dan Statistik Pemerintah Kota Magelang
2. Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	2. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	%	Forum warga yg terbentuk karena persamaan kepentingan dan inisiasi warga	Kabid pada Bidang Perencanaan, Bidang Pemerintahan dan Sosbud, Bidang Ekonomi Prasarana Wilayah Bappeda Kota Magelang	Data Forum Warga mitra OPD
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif	1. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	Jumlah program yang ada di RPJMD dibagi jumlah program di RKPD	Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Magelang	1. Dokumen RPJMD 2. Dokumen RKPD
	2. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	%	Jumlah usulan dalam telaah pokpir Dewan yang diakomodir di bagi jumlah usulan hasil telaah Pokpir DPRD	Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Magelang	1. Data pokpir Dewan 2. Data Renja
	3. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	%	Jumlah usulan Musrenbang yang disepakati dibagi Jumlah Usulan Musrenbang yang diakomodir dalam Renja	Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Magelang	1. Data usulan pada Musrenbang 2. Data Renja
	4. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	%	Jumlah usulan konsultasi publik yang diakomodir dibagi Jumlah usulan saat konsultasi publik	Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Magelang	1. Data usulan pada Konsultasi Publik 2. Data Renja
	5. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	%	Jumlah usulan masyarakat dalam <i>E- Aspirasi</i> yang diakomodir dibagi total usulan E aspirasi tahun berjalan	Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Magelang	1. Data usulan pada <i>e-aspirasi</i> 2. Data Renja

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
<b>SUBBID : PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN</b>					
1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan yang didukung dengan dokumen perencanaan yang berkualitas	1. Terlaksananya tahapan/ mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	%	Prosentase terselenggaranya tahapan/ mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan di bagi dengan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku	Ka Subid Penyusunan Rencana Pembangunan Bappeda Kota Magelang	1. Peraturan terkait dengan sistem perencanaan pembangunan daerah 2. Peraturan terkait sehubungan dengan teknis penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan perencanaan daerah
	2. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas	%	Ketersediaan dokumen Perencanaan daerah yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundangan dan di susun tepat waktu di bagi dengan dokumen perencanaan daerah yang harus di susun	Ka Subid Penyusunan Rencana Pembangunan Bappeda Kota Magelang	1. Peraturan terkait dengan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan 2. Dokumen perencanaan yang lebih tinggi kedudukannya 3. Peraturan terkait kebijakan- kebijakan yang akan di pergunakan dalam menyusun dokumen perencanaan
<b>SUBBID : PENYUSUNAN DATA, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>					
1. Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate	1. Tingkat ketersediaan Profil Kota Magelang	%	Prosentase ketersediaan Profil Kota Magelang	Ka Subid Data, Penfendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Magelang	1. Petujuk teknis penye lenggaran kegiatan 2. Data dukung dari OPD sebagai bahan penyusunan Dokumen

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	2. Tingkat aktualitas data dan informasi publik	%	Jumlah informasi data yang diupload dalam website dibagi jumlah informasi seharusnya yang diupload	Ka Subid Data, Penfendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Magelang	Data – data yang akan di kompilasi dan di sajikan
2. Terwujudnya monev dan pengendalian perencanaan daerah yang berbasis data yang akurat dan akuntabel	Terselenggaranya monov dan pengendalian perencanaan pembangunan	%	Prosentase ketersediaan dokumen monev dan dokumen pengendalian perencanaan pembangunan daerah	Ka Subid Data, Penfendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Magelang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. data capaian kinerja indikator daerah dan indikator dalam dokumen perencanaan</li> <li>2. Dokumen monev perencanaan</li> <li>3. Dokumen pengendalian perencanaan pembangunan</li> </ol>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG EKONOMI dan PRASARANA WILAYAH BAPPEDA KOTA MAGELANG DAN SEKSI/SUBBID DIBAWAHNYA.**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>BIDANG EKONOMI dan PRASARANA WILAYAH</b>					
1. Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	%	Forum warga yg terbentuk karena persamaan kepentingan dan inisiasi warga	Kabid pada Bidang Perencanaan, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Ekonomi Prasarana Wilayah Bappeda Kota Magelang	Data Forum Warga mitra OPD
2. Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	%	% implementasi perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ditambah % ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi sosial budaya dan fisik prasarana di bagi 2	Kabid pada Bidang Perencanaan, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Ekonomi Prasarana Wilayah Bappeda Kota Magelang	1. Data Renja dan RPJMD 2. Data data statistic dan data - data sektoral yang di butuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan
<b>SUBBID : PERTANIAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>					
1. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	1. Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang berkualitas	%	% implementasi perencanaan bidang ekonomi, ditambah % ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi di bagi 2	KaSubid Pertanian dan Lingkungan Hidup Bappeda Kota Magelang	1. Data Renja dan RPJMD 2. Data data statistic dan data - data sektoral yang di butuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan
2. Meningkatnya koordinasi, monitoring dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi	2. Cakupan koordinasi, monitoring dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	%	Jumlah koordinasi, monitoring yang dilakukan dibagi jumlah dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi yang seharusnya	KaSubid Pertanian dan Lingkungan Hidup Bappeda Kota Magelang	1. Data Renja dan RPJMD 2. Data hasil kormonev atas capaian indikator kinerja OPD

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>SUBBID : KOPERASI, INDUSTRI PERDAGANGAN ENERGI DAN DUNIA USAHA</b>					
1. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	1. Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang berkualitas	%	% implementasi perencanaan bidang ekonomi, ditambah % ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi di bagi 2	KaSubid Koperasi, Industri Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha Bappeda Kota Magelang	1. Data Renja dan RPJMD 2. Data data statistic dan data - data sektoral yang di butuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan
2. Meningkatnya koordinasi, monitoring dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi	2. Cakupan koordinasi , monitoring dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	%	Jumlah koordinasi, monitoring yang dilakukan dibagi jumlah dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi yang seharusnya	KaSubid Koperasi, Industri Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha Bappeda Kota Magelang	1. Data Renja dan RPJMD 2. Data hasil kormonev atas capaian indikator kinerja OPD
<b>SUBBID : PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH</b>					
1. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang fisik prasarana yang berkualitas	1. Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang bidang fisik prasarana yang berkualitas	%	% implementasi perencanaan bidang ekonomi, ditambah % ketersediaan dokumen perencanaan bidang bidang fisik prasarana di bagi 2	KaSubid Permukiman dan Prasarana wilayah Bappeda Kota Magelang	1. Data Renja dan RPJMD 2. Data data statistic dan data - data sektoral yang di butuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan
2. Meningkatnya koordinasi, monitoring dan sinkronisasi perencanaan bidang bidang fisik prasarana	2. Cakupan koordinasi , monitoring dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang bidang fisik prasarana	%	Jumlah koordinasi, monitoring yang dilakukan dibagi jumlah dan sinkronisasi perencanaan bidang bidang fisik prasarana yang seharusnya	KaSubid Permukiman dan Prasarana wilayah Bappeda Kota Magelang	1. Data Renja dan RPJMD 2. Data hasil kormonev atas capaian indikator kinerja OPD

**IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA BAPPEDA KOTA MAGELANG DAN SEKSI/SUBBID DIBAWAHNYA.**

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA</b>					
1. Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	1. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	%	Forum warga yg terbentuk karena persamaan kepentingan dan inisiasi warga	Kabid pada Bidang Perencanaan, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Ekonomi Prasarana Wilayah Bappeda Kota Magelang	Data Forum Warga mitra OPD
2. Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	%	% implementasi perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ditambah % ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi sosial budaya dan fisik prasarana di bagi 2	Kabid pada Bidang Perencanaan, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Ekonomi Prasarana Wilayah Bappeda Kota Magelang	1. Data Renja dan RPJMD 2. Data data statistik dan data - data sektoral yang di butuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan
<b>KASUBID : KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>					
1. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya yang berkualitas	1. Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya yang berkualitas	%	% implementasi perencanaan bidang ekonomi, ditambah % ketersediaan dokumen perencanaan bidang bidang sosial budaya di bagi 2	KaSubid Kesejahteraan Masyarakat Bappeda Kota Magelang	1. Data Renja dan RPJMD 2. Data data statistik dan data - data sektoral yang di butuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan
2. Meningkatnya koordinasi, montoring dan sinkronisasi perencanaan bidang bidang sosial budaya	2. Cakupan koordinasi , monitoring dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	%	Jumlah koordinasi, monitoring yang dilakukan dibagi jumlah dan sinkronisasi perencanaan bidang bidang sosial budaya yang seharusnya	KaSubid Kesejahteraan Masyarakat Bappeda Kota Magelang	1. Data Renja dan RPJMD 2. Data hasil kormonev atas capaian indikator kinerja OPD

<b>KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>KASUBID : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>					
1. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya yang berkualitas	1. Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya yang berkualitas	%	% implementasi perencanaan bidang ekonomi, ditambah % ketersediaan dokumen perencanaan bidang bidang sosial budaya di bagi 2	KaSubid Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kota Magelang	1. Data Renja dan RPJMD 2. Data data statistik dan data - data sektoral yang di butuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan
2. Meningkatnya koordinasi, monitoring dan sinkronisasi perencanaan bidang bidang sosial budaya	2. Cakupan koordinasi , monitoring dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	%	Jumlah koordinasi, monitoring yang dilakukan dibagi jumlah dan sinkronisasi perencanaan bidang bidang sosial budaya yang seharusnya	KaSubid Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kota Magelang	1. Data Renja dan RPJMD 2. Data hasil kormonev atas capaian indikator kinerja OPD
<b>KASUBID : PEMERINTAHAN</b>					
1. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya yang berkualitas	1. Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya yang berkualitas	%	% implementasi perencanaan bidang ekonomi, ditambah % ketersediaan dokumen perencanaan bidang bidang sosial budaya di bagi 2	KaSubid Pemerintahan Bappeda Kota Magelang	1. Data Renja dan RPJMD 2. Data data statistik dan data - data sektoral yang di butuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan
2. Meningkatnya koordinasi, monitoring dan sinkronisasi perencanaan bidang bidang sosial budaya	2. Cakupan koordinasi , monitoring dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	%	Jumlah koordinasi, monitoring yang dilakukan dibagi jumlah dan sinkronisasi perencanaan bidang bidang sosial budaya yang seharusnya	KaSubid Pemerintahan Bappeda Kota Magelang	1. Data Renja dan RPJMD 2. Data hasil kormonev atas capaian indikator kinerja OPD